



## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN (Studi Kasus Desa Kambitin dan Kambitin Raya Kecamatan Tanjung)**

### *COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH THE INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF FISHERIES IN THE MAKING (Case Studies village Kambitin and Kambitin Raya Subdistrict Tanjung)*

Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong  
Jl. Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong  
Kode Pos 70123 Telp./Fax (0526) 2022484

**Murjani\***

#### **ABSTRACT**

*Local fish hatchery units (UPRs) located in Kambitin and Kambitin Raya Villages of Tanjung District are the development centers of the aquacultures in Tabalong Regency. In order to support the productivity of those FHUs, the local government established a fish breeding center. The breeding center covers and supervises eight FHUs (Sido Makmur, Usaha Bersama, Harapan Makmur, Karya Makmur, Jaya Mukti, Barokah Jaya, Bumi Makmur and Sri Lestari).*

*The study was aimed to analyze the corcodance between the UPRs and the fish breeding center in Kambitin and also to analyze the local government intervention in the framework of community empowerment through strengthening institution to support fishery development.*

*The result of this research showed that was a competition and conducive situation between the fish breeding center and the fish hatchery unit. This situation was a negative effect of the implementation of Regional Regulation (PD No. 05 Year 2006) about retribution of the local government's product unit and regulation of Regents Tabalong (Perbup No. 02 Year 2008) about the implementation directions of the regional regulation. Due to that regulation, the original function of the fish breeding center, as supervising unit of UPRs, was changed to be one the income generating units of the local government. Consequently, the fish breeding center with a good productivity became a new competitor for the UPRs with lower competitiveness. In addition, the relationship among them was not conducive. Therefore, a strategic policy of the local government to reset the role of the fish breeding center to its original function should be taken to stabilize their relationship. In addition, the fish breeding center, the fish should be prohibited to market its products to the same consumers of the UPRs.*

*Inclusion, as an effort to empower the community, interversion of the local government is required by strengthening the local institutions such as UPRs and the fish breeding center proportionally.*

*Keywords : Community Empowerment, Institutin Strangthening, Government Intervention.*



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

## PENDAHULUAN

Sejak tahun 2000 setelah dicanangkannya Desa Kambitin dan Kambitin Raya sebagai Sentra Benih maka BBI melakukan tugas dan fungsinya sebagai pembina UPR, namun pada tahun 2009 BBI Kambitin mulai memproduksi benih ikan yang dijual langsung kepada konsumen, sehingga pelanggan dan konsumen baru yang semula membeli benih ikan di UPR menjadi berkurang karena beralih ke BBI. Akibatnya pada tahun 2011 UPR menutup aktifitas pembenihan di kolam BBI Kambitin, sehingga komunikasi BBI Kambitin dan UPR mulai berkurang, BBI Kambitin tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal kepada UPR.

Dalam hal ini terjadi konflik kepentingan produksi dan pemasaran antara UPR dengan BBI Kambitin. Akibat dari pemasaran yang dilakukan BBI Kambitin berdampak pada menurunnya nilai jual benih ikan UPR. Karena kondisi seperti ini maka kelompok pembudidaya benih ikan membatasi aktifitas produksi benih ikan di BBI Kambitin. UPR berkeinginan agar BBI berfungsi sebagaimana mestinya sebagai penyedia induk dan pendamping UPR tanpa harus menjual benih ikan Nila dan Mas.

BBI Kambitin dan UPR merupakan ujung tombak pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan Perikanan. Tugas yang diemban BBI Kambitin adalah melaksanakan penerapan teknik perbenihan budidaya air tawar dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah kabupaten. Pelaksanaan tugas tersebut tidak terlepas dari visi BBI Kambitin yakni mewujudkan balai sebagai institusi pemberi layanan prima yang berorientasi pada agribisnis dan berbasis potensi daerah dalam rangka penyediaan benih unggul dan induk sesuai dengan tingkat kebutuhan. Oleh karena itu fungsi BBI Kambitin sebagai penyedia induk dan calon induk "*parent stock*" serta distribusi induk kepada para pembudidaya pembenihan. Balai Benih ikan bertanggung jawab atas penerapan teknik budidaya pembenihan dan pengendalian hama penyakit serta mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih. Sehingga BBI Kambitin dijadikan Pembina, dan pendamping dan fasilitator bagi UPR. Sebab berbagai hasil inovasi dan pengembangan perbenihan ikan selanjutnya ditransformasikan keilmuan dan manfaatnya kepada para pembudidaya pembenihan ikan.



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Sejak tahun 2011 – 2014 (saat ini) BBI Kambitin tidak lagi berperan dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang membina, membimbing dan memfasilitasi aktifitas pembudidayaan benih ikan di Desa Kambitin dan Kambitin Raya. BBI Kambitin tidak lagi memberikan pelatihan-pelatihan, fasilitasi dan pendampingan terhadap produktifitas benih ikan di UPR. BBI Kambitin menjadi stagnan, tidak bisa menjadi penyedia induk dan calon induk (*parent stock*) karena terbentur dengan harmonisasi institusi yang masih belum baik dan bahkan produktifitas BBI Kambitin diawasi oleh UPR. Sehingga aktifitas BBI Kambitin lebih banyak pada kegiatan intern balai sendiri dalam rangka pemeliharaan kolam-kolam yang ada di sana.

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengapa aspek kelembagaan tidak berperan maksimal dalam kasus pemberdayaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat melalui fungsi Balai Benih Ikan Kambitin ?
- b. Bagaimana Intervensi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan melalui penguatan kelembagaan

untuk menunjang pembangunan perikanan?

Berdasarkan pokok dan perumusan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kelembagaan melalui tugas dan fungsi BBI Kambitin dan intervensi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan UPR melalui penguatan lembaga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan perikanan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Kegiatan pembudidayaan pembenihan merupakan aktifitas yang dilakukan kelompok UPR Desa Kambitin dan Kambitin Raya untuk menambah penghasilan keluarga. Pemerintah Daerah telah menjadikan desa tersebut sebagai sentra benih ikan, sehingga desa inilah yang akan memasok benih ikan ke kecamatan lain dan bahkan ke kabupaten lain. Keterlibatan masyarakat Kambitin dan Kambitin Raya yang tergabung dalam UPR diharapkan dapat menjadi lembaga yang mampu menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tabalong karena perannya sebagai penyedia benih ikan.

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Proses pembenihan ikan tidak terlepas dengan peranan BBI Kambitin Kambitin yang merupakan kepanjangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dalam rangka melaksanakan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan perikanan. BBI Kambitin sangat berperan dalam pendampingan, fasilitasi maupun pembinaan terhadap UPR, sehingga benih ikan yang dihasilkan memiliki kualitas baik dan bersertifikat. BBI Kambitin harus memiliki upaya memberdayakan UPR supaya dapat berkembang dengan baik.

Upaya pembinaan yang dilakukan BBI sejak tahun 2000 hingga 2011 menjadi terhenti dengan begitu saja, ketika BBI memproduksi dan menjual benih ikan yang sama dengan jenis benih ikan yang sedang diproduksi UPR. Hal ini tentunya memicu protes dari UPR, sebab kebanyakan konsumen benih ikan menjadi beralih membeli benih kepada BBI.

Pemerintah Daerah telah memberikan tugas dan fungsi kepada BBI untuk melakukan pembinaan, memfasilitasi dengan memberikan layanan sebagai penyedia calon induk “parent stock” dan distribusi induk, penerapan pembenihan dan distribusi benih, penerapan teknik pelaksana

sumberdaya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama penyakit, serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi system mutu benih. Tugas dan fungsi BBI Kambitin tersebut memiliki peranan penting dalam pemberdayaan UPR dalam rangka meningkatkan produksi benih dan kesejahteraan serta menunjang pembangunan perikanan.

Selain sasaran kelompok dalam pemberdayaan, tentunya ada unsur ataupun institusi lain yang menjadi penggerak dalam pemberdayaan masyarakat. Institusi atau lembaga ini akan memiliki peran perubahan yang membantu proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini BBI Kambitin merupakan lembaga yang berperan untuk membantu perubahan sosial masyarakat Kambitin dan Kambitin Raya. Sedangkan kelompok sasarannya merupakan masyarakat Kambitin dan Kambitin Raya yang tergabung dalam kelompok-kelompok budidaya ikan pembenihan yang disebut dengan UPR.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya<sup>1</sup>.

Kelembagaan merupakan bentuk hubungan antara dua orang atau lebih, dua kelompok orang (masyarakat) atau hubungan orang dengan kelompok masyarakat dalam penggunaan sumber daya yang langka (mempunyai ciri khusus) dan distribusi (adanya unsur pelayanan). Kelembagaan dalam arti institusi mengandung empat unsure pokok yaitu : (a) aturan main, (b) pengaturan hak dan kewajiban, (c) batasan ikatan dan (d) adanya sanksi (hukuman). Sedangkan kelembagaan dalam pengertian organisasi di samping adanya empat unsur di atas juga dicirikan dengan adanya struktur (pengurus kelompok), tujuan yang jelas,

mempunyai partisipan, teknologi dan sumber daya<sup>2</sup>.

Proses peningkatan kapasitas berkelompok seringkali dilakukan secara dinamis dalam suatu pelatihan-pelatihan yang menggunakan metode dinamika kelompok. Setiap organisasi/perkumpulan/kelompok tidak terlepas dari peranan pemimpin dalam menjalankan aktifitas kelompok.

Sehubungan dengan perilaku anggota kelompok di dalam dan antar jaringan atau kelompok yang berkaitan dengan modal sosial, Aiyar (2001) membedakan tiga tipe Modal Sosial, yaitu sebagai berikut : 1) *Sosial Bounding* (Nilai, Kultur, Persepsi dan Tradisi atau adat-istiadat), 2) *Sosial Bridging*, (berupa institusi maupun mekanisme), 3) *Sosial Linking* (hubungan/jaringan sosial). Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta

<sup>3</sup> Isbandi Ruminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 2008.



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

## Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif, maksudnya penelitian ini akan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan melalui penguatan kelembagaan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Perikanan.

Data-data penelitian diperoleh dari hasil kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi yang diambil dari responden atau kelompok sasaran. Untuk mengetahui hasil penelitian, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan.

Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menggali permasalahan utamanya sehingga dapat diperoleh *grand thema* yakni dalam rangka meningkatkan produktifitas dan menunjang pembangunan perikanan maka pendekatan yang dilakukan oleh BBI adalah pemberdayaan terhadap UPR sehingga peneliti memulai dengan teori pemberdayaan masyarakat.

Dengan tema pemberdayaan ini, peneliti selanjutnya melihat persoalan yang terjadi antara UPR dan BBI

kemudian memfokuskan pada sumber masalah yang terjadi antara UPR dengan BBI untuk menggali factor penyebab terjadinya masalah tersebut. Teori yang dapat dikembangkan untuk mempertajam pemberdayaan tersebut di atas adalah teori yang berhubungan dengan dinamika kelompok dan penguatan lembaga termasuk didalamnya modal sosial sebagai kerangka berfikir untuk menentukan pilihan-pilihan dan memberikan solusi terhadap permasalahan UPR dengan BBI Kambitin

## HASIL PENELITIAN

### Konteks Pemberdayaan UPR

Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Studi Kasus Desa Kambitin dan Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong menempatkan UPR sebagai ujung tombak pengembangan kegiatan budidaya pembenihan dan juga pembesaran ikan di Kabupaten Tabalong dan sekitarnya. Proses pembenihan ikan di Kambitin dan Kambitin Raya didukung oleh BBI Kambitin. Keberadaan BBI dimaksudkan untuk menunjang produktifitas UPR yang berada di wilayah kerjanya. Sehingga bila dikaitkan dengan konsep pengetahuan

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

pemberdayaan di atas, maka pihak yang memperoleh keberdayaan adalah UPR sedangkan pihak yang memberi keberdayaan adalah BBI.

Penelitian ini menemukan bahwa BBI Kambitin memiliki 8 kelompok binaan, yaitu Kelompok Sido Makmur, Usaha Bersama, Harapan Makmur, Karya Makmur, Jaya Mukti, Barokah Jaya, Bumi Makmur dan Sri Lestari. Namun dari 8 kelompok binaan tersebut, sejak tahun 2010 hingga 2014 kelompok binaan BBI yang masih aktif hanya 5 kelompok yaitu, Kelompok Sido Makmur, Jaya Mukti, Barokah Jaya, Bumi Makmur dan Sri Lestari. Sedangkan 3 kelompok lainnya tidak aktif lagi, ketidakaktifan 3 kelompok tersebut terjadi dari dampak proses persaingan penjualan benih ikan dengan BBI.

Hasil pengamatan tentang hubungan yang terjalin antara para Pembudidaya dengan BBI Kambitin yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap anggota UPR bahwa hubungan antara para Pembudidaya dengan BBI Kambitin diperoleh fakta bahwa hubungan antara BBI Kambitin dengan UPR sudah tidak lagi berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan :

a. BBI Kambitin melakukan pembenihan sendiri dan menjual

hasilnya kepada pembudidaya pembesaran.

- b. Pemerintah Daerah lebih fokus memfasilitasi kegiatan pembenihan di BBI Kambitin terutama pada fasilitasi sarana dan prasarana kolam sedangkan kelompok pembenihan tidak mendapatkan bantuan fasilitas sarana dan prasarana kolam.
- c. Pengelola BBI Kambitin sudah tidak proaktif melakukan penyuluhan dan bimbingan terhadap kelompok budidaya pembenihan ikan.

Kondisi tersebut terjadi berawal dari upaya BBI melakukan pembenihan sendiri dan menjualnya kepada konsumen sehingga terjadi persaingan produksi dan pemasaran. Pengelola BBI Kambitin, menjelaskan bahwa penjualan benih ikan dimaksudkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tabalong dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat dan belum terpenuhi. Namun para pembudidaya benih ikan tidak sependapat dengan pernyataan pengelola BBI Kambitin dan program pemerintah daerah untuk menjadikan BBI Kambitin sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah, karena menurut mereka Pendapatan Asli Daerah bisa

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

diperoleh dengan cara memberdayakan masyarakat melalui program kemitraan dan kerjasama yang harmonis antara lembaga pemerintah dengan masyarakat. Namun langkah kerja yang dilakukan BBI Kambitin tersebut ternyata merugikan UPR, sebab konsumen beralih membeli benih ikan kepada BBI Kambitin, penghasilan pembudidaya benih ikan menjadi berkurang.

Dengan demikian maka yang menjadi penyebab utama permasalahan dalam penelitian ini adalah penjualan Benih Ikan nila dan mas oleh BBI kepada konsumen. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong telah menjadikan BBI Kambitin sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah No. 05 tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Peraturan Bupati Tabalong No. 02 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah No. 05 tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada BBI Kambitin Lokal Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong.

Keberadaan peraturan tersebut, memunculkan persaingan antara BBI Kambitin dan UPR, persaingan ini menimbulkan hubungan keduanya tidak kondusif lagi, tugas dan fungsi BBI

Kambitin yang sesungguhnya sebagai pembina UPR beralih fungsi menjadi upaya BBI Kambitin untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah sehingga ada usaha pembenihan yang dilakukan UPR tidak mampu bersaing dengan BBI Kambitin. Tentunya pada akhirnya tujuan pembangunan perikanan dan peningkatan kapasitas serta kesejahteraan UPR menjadi terhambat.

### **Konteks Penguatan Kelembagaan**

Melibatkan masyarakat dalam pembangunan lebih memberikan posisi masyarakat untuk lebih berdaya. Oleh karena itu dalam implementasinya pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat lokal untuk ikut mengelola proses pembangunan di daerahnya, hal ini perlu dilakukan dengan membangun sebuah hubungan yang harmonis antara Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dengan BBI Kambitin, namun saat ini hubungan lembaga yang terjalin sifatnya masih biasa-biasa saja, bahkan cenderung belum harmonis.

Penguatan kelompok secara internal mereka terus lakukan, mereka berupaya saling membantu satu sama lainnya, misalnya dalam pemijahan ada anggota yang tidak bisa maka anggota



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

yang lain membantu pemijahan untuk dipelihara di kolamnya masing-masing (pola tutor sejawat) yang tentu saja masih minim pengetahuan dan keterampilan karena kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh BBI Kambitin memang masih minim. Demikian halnya juga dengan penyediaan induk ataupun calon induk, para Pembudidaya membeli di luar daerah dengan modal sendiri atau modal bersama dari kelompok. Termasuk dalam permodalan, sebagian kelompok melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Kelompok Sido Makmur melakukan pinjaman permodalan usaha dengan Bank BRI Cabang Murung Pudak, dalam penyediaan induk ikan Kelompok Sido Makmur bekerjasama dengan PT. Luxindo Internusa Kabupaten Banjar.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dapat mengkondisikan hubungan UPR dan BBI menjadi sinergis seperti semula sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka dengan upaya melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah dapat melakukan beberapa hal, yaitu :

a. Mengevaluasi manajemen BBI Kambitin dan mengusulkan

Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi daerah.

- b. Mengatur pola pembinaan melalui kegiatan pelatihan maupun pertemuan rutin dengan UPR.
- c. Mengembalikan fungsi dan tugas BBI Kambitin sebagai penyedia induk dan Pembina, pendamping serta fasilitasi terhadap UPR.
- d. Adanya pemilihan atau spesialisasi komoditas yang diproduksi BBI Kambitin dan UPR, misalnya ketika UPR memproduksi benih ikan mas dan nila, maka BBI Kambitin memproduksi jenis komoditas yang lain seperti ikan patin, lele, udang galah, dan jenis ikan lokal.
- e. Penyediaan indukan yang sesuai dengan kompetensinya agar kualitasnya terjaga dan mengatur periodisasi pembenihan antara BBI Kambitin Dan UPR.
- f. BBI Kambitin dapat selalu mengadakan penelitian, kajian-kajian terhadap benih ikan yang lain sebagai inovasi agar selanjutnya dikembangkan oleh UPR.

## KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan paparan hasil penelitian ini, maka dapat tarik beberapa kesimpulan yang berhubungan

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

dengan pokok masalah yakni sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program pendampingan, pembinaan, fasilitator BBI Kambitin dan Kambitin Raya masih belum sesuai dengan tugas dan fungsinya karena adanya pergeseran fungsi akibat dari intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang mengeluarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan mengamanatkan kepada BBI untuk menjadi sumber PAD, tanpa melihat dampak buruk terhadap UPR yang menimbulkan persaingan pasar sehingga UPR menjadi tidak berdaya.
- b. Intervensi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan perlu melakukan penguatan kelembagaan terhadap BBI dan UPR untuk menunjang pembangunan perikanan dirasakan masyarakat masih sangat kurang dan belum proposional sehingga telah menimbulkan dampak yang terjadi dari kurangnya peranan BBI Kambitin dalam pemberdayaan masyarakat dan tiga kelompok Unit Pembenihan Ikan tidak lagi dapat menjalankan usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut :

- a. Mengembalikan fungsi BBI Kambitin sebagai balai pembenihan dan tidak melakukan pemasaran komoditas benih ikan yang sama dengan UPR, sehingga tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Apabila BBI melakukan penjualan hanya bersifat kepada para petani kelompok UPR saja, sehingga tidak terjadi konflik.
- b. Intervensi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan melalui penguatan kelembagaan secara proporsional

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah dan Purwanto, 2006. *Dinamika Kelompok Konsep dan Aplikasi*, PT. Refika Aditam
- Alfitri, 2011. *Community Development, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar.
- Ambar Teguh Sulistiyani, 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Bappeda Tabalong. 2010. *Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kambitin Kabupaten Tabalong*.
- Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong. 2011. *Laporan Pelaksanaan Budidaya Ikan Tahun 2011*, Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Perikanan Kabupaten  
Tabalong.

Suharsimi Arikunto, 2003. *Manajemen Penelitian*, PT. Rineka Cipta Jakarta.

Ife, Jim dan Tesoriero, Frank.  
*Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Isbandi Rukminto Adi, 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.

I Nyoman Sumaryadi, 2010. *Sosiologi Pemerintahan, Ghalia Indonesia*, Jakarta.

John Field, 2010. Diterjemahkan Nurhadi, *Modal Sosial, Kreasi Wacana*, Yogyakarta.

Luthfi Fatah, 2007. *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*, Pustaka Banua Banjarmasin.

Mukhtar Sarman, 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*, Pustaka FISIP Banjarmasin.

Mukhtar Sarman dan Taufik Hidayat, 2010. *Panduan Prosedur Penelitian dan Penulisan Tesis, Program Magister Sains Administrasi Pembangunan UNLAM Banjarbaru*,.

Soetomo, 2006. *Srategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.